

## **IMPLIKASI PROGRAM TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KEPEMILIKAN TRANSMIGRAN ATAS BARANG ELEKTRONIKA DI UPT. TANJUNG BUKA KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Achluddin Ibnu Rochim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### **ABSTRACT**

The transmigration program aims to increase prosperity. Among indicator prosperity is the access of transmigrants to ownership of electronic goods, besides other indicators. Departing from the above problems then this study will identify the extent of the opportunities of transmigrants from the region this East Java province of electronic goods. Depnakertrans as the maker the policy of the agreement between regions (Kerja Sama Antar Daerah/KSAD) model in the transmigration program needs to be measured in achieving program objectives, therefore evaluation is carried out to determine the consequences of policy, and effectiveness impact of policy. With the qualitative descriptive method, this study was able to find that one of the indicators of prosperity is viewed from the aspect of transmigrant ownership for electronic goods it turns out to be less relevant. This is visible when compared ownership of electronic goods between before and after transmigrants placed in the transmigration location which happened actually did not increase at certain electronic objects. Instead there are certain electronic objects that actually exist and owned after they were in the transmigration area because their needs, for example, were solar cell due to electrical access from PLN that cannot be obtained.

**Keywords:** *Transmigration Program, Policy Evaluation, Transmigrants, Electronic Goods*

### **PENDAHULUAN**

Sejak era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan paradigma dalam konsep pembangunan transmigrasi yang dibangun dalam satuan-satuan kawasan terpisah dari pemukiman penduduk yang sudah ada, yakni dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan cara kerjasama antar daerah.

Program transmigrasi pada era ini belum menjangkau masyarakat setempat di sekitar lokasi pemukiman transmigrasi, sehingga berpotensi munculnya kecemburuan sosial terhadap masyarakat transmigran. Kurang adanya dukungan kelengkapan infrastruktur pembentuk kawasan. Pembangunan sarana dan prasarana fisik pada waktu itu hanya difokuskan pada penyediaan di dalam lingkungan pemukiman di satuan pemukiman yang bersangkutan, dan belum ada upaya untuk membangun infrastruktur yang menunjang pembentukan suatu kawasan yang bertumpu pada pemberdayaan potensi setempat dalam arti luas.

Pada tahun 2001 Provinsi Jawa Timur telah mempelopori penyelenggaraan program transmigrasi melalui proses kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada tahun 2002, Dirjen Mobilitas Penduduk, sekarang Ditjen Penyiapan, Pengerahan, Pemandahan dan Penempatan Transmigrasi atau Ditjen P4T, mengeluarkan Pedoman Kerjasama Antar Daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan program transmigrasi menurut paradigma baru penyelenggaraan transmigrasi.

Melalui model Kerjasama Antar Daerah (KSAD) paradigma baru pembangunan transmigrasi di era Otonomi Daerah diharapkan merupakan penyempurnaan dari konsep penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya. Melalui paradigma baru penyelenggaraan program

transmigrasi, proses perpindahan dan penempatan transmigran tersebut diharuskan melalui mekanisme kerjasama antara daerah pengirim dan penempatan transmigran.

Dengan adanya model transmigrasi ini, maka peneliti menduga bahwa pelaksanaan program transmigrasi ini akan berimplikasi pada kepemilikan atas alat-alat atau barang elektronika. Barang yang pada saat para transmigran di daerah asal tidak pernah berhasil memilikinya. Akses para transmigran terhadap kepemilikan barang-barang elektronika inilah yang hendak diteliti sebagai bagian dari indikator kemakmuran, selain indikator-indikator yang lain. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini akan mengidentifikasi seberapa besar peluang para transmigran asal dari daerah provinsi Jawa Timur ini terhadap barang elektronika.

Dengan demikian rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana implikasi program transmigrasi pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dalam kepemilikan transmigran atas barang elektronika di UPT. Tanjung Buka Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?

## **METODE**

### **Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian kebijakan ini bersifat Deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan eksplorasi terhadap fenomena interaksi sosial antar *stakeholders* yang terlibat dalam program transmigrasi. Guna memahami fenomena yang ada secara mendalam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada penggunaan metode kualitatif, khususnya kebijakan penyelenggaraan program transmigrasi melalui model kerjasama antar daerah (KSAD).

### **Fokus Penelitian**

Memperhatikan tujuan penelitian bahwa penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan program transmigrasi melalui model KSAD, maka fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada evaluasi hasil penyelenggaraan program agar dapat menyusun masukan-masukan sebagai *feedback* bagi peningkatan efektivitas penerapan prinsip-prinsip Kerja Sama Antar Daerah sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan program transmigrasi.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan difokuskan pada Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah tujuan yang paling diminati oleh calon transmigran utamanya asal Provinsi Jawa Timur. 4) Responden Dari Transmigran Jawa Timur yang berada di Tanjung Buka Satuan Permukiman (SP) 5, (SP) 6 dan (SP) 8 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah tentang identitas informan, pernyataan tentang pemahaman dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan program transmigrasi melalui model KSAD, sehingga data-data tersebut akan berupa narasi verbal yang bersumber dari informan. Sedangkan data sekunder berupa data-data kepustakaan seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, data statistik yang diperoleh dari lembaga yang terkait program transmigrasi.

### **Pemilihan Informan**

Pengumpulan informasi dari informan adalah: 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek, dan pejabat diajarannya yang membidangi ketransmigrasian. 2) Para Pejabat yang terlibat pada proses perencanaan, pelaksanaan program transmigrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kepala Bidang Mobilitas Penduduk yang menangani perencanaan

dan pelaksanaan kerjasamanya, 3) Transmigran asal Provinsi Jawa Timur yang telah ditempatkan di lokasi transmigrasi Tanjung Buka Satuan Permukiman (SP) 5, (SP) 6 dan (SP) 8 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Informasi yang akan diperoleh dari transmigran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan transmigrasi melalui model KSAD. Sebagai informan tambahan adalah pejabat di Depnakertrans dan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu: 1) Pejabat di lingkungan Ditjen Penyiapan Pengerahan Pemandangan dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans sebagai Unit Esselon I teknis yang menangani penyiapan, pengerahan, pemindahan dan penempatan serta memberikan mediasi dalam KSAD baik antara Provinsi/Kabupaten daerah pengirim dan daerah penerima, maupun dengan calon investor sebagai calon mitra usaha, yaitu Kasubdit Kerjasama pada Direktorat Promosi Investasi dan Kemitraan khususnya pada Sub Direktorat Kerjasama Antar Daerah, Sekretariat Ditjen P4T khususnya pada Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan. 2) Kasubdin Bina Program dan Kasubdin Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai salah satu Provinsi Daerah penerima yang paling banyak menerima transmigran asal Jawa Timur, 3) Informan lain yang ternyata banyak mempunyai informasi tentang pelaksanaan transmigrasi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah tentang identitas informan, pernyataan tentang pemahaman dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan program transmigrasi melalui model KSAD. Data sekunder berupa data-data kepustakaan seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, data statistik, foto-foto dan sebagainya yang diperoleh dari lembaga yang terkait program transmigrasi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Wawancara semi struktur dimana peneliti melakukan komunikasi dua arah dengan informan berdasarkan acuan daftar pertanyaan tipe terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada para pelaku kebijakan, dan kepada transmigran yang kembali ke desa asal, dilanjutkan dengan wawancara secara lebih mendalam digunakan karena pedoman wawancara yang digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sebelumnya. 2.

Observasi sebagai instrumen kunci melakukan pengamatan secara seksama terhadap fenomena terkait dengan pelaksanaan/penyelenggaraan program transmigrasi di Jawa Timur melalui model KSAD, dengan fokus di Kabupaten Trenggalek sebagai wilayah penelitian.

## **TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). Sedangkan menurut Thomas R Dye (1978:17), kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Selanjutnya Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*a projected program of goals, values and practices*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah) (1984:16) Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu: a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (1984:17-18).

Definisi lain dikemukakan oleh James Anderson “*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*” (Islamy, 1984:19). Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas adalah: *Pertama*, bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. *Kedua*, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. *Ketiga*, bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. *Keempat*, bahwa kebijakan publik itu bias bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. *Kelima*, bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

### **Evaluasi Implementasi**

Adapun keberhasilan program tersebut tergantung pada *implementability* dari program itu, yaitu isi dan konteks kebijakan. Oleh karena itu Grindle mengusulkan 9 (sembilan) variabel independen, yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan. Sembilan variabel bebas namun dalam hal penelitian ini hanya digunakan enam variable saja yaitu, isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat yang akan dihasilkan, (3) tingkat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakaan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumberdaya yang dikerahkan.

Menurut Dunn istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Selanjutnya menurut Dunn, secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn,2003: 608). Selanjutnya Dunn (2003:610-611) juga mengatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. *Pertama*, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Depnakertrans selaku pembuat kebijakan model KSAD dalam penyelenggaraan program transmigrasi, bagaimanapun juga tentu ingin agar tujuan KSAD tersebut akan tercapai. Maka ia berkepentingan untuk menjaga proses implementasi KSAD sebaik mungkin. Belum tercapainya tujuan KSAD saat ini, tentu saja pasti ingin mengetahui penyebab ”kegagalan” tersebut agar tidak terulang kembali di masa depan. Oleh karena itu evaluasi

dapat dilakukan untuk mengetahui proses awal pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan.

## **PEMBAHASAN**

### **Identitas Transmigran**

Identitas transmigran menurut jenis kelamin, Umur, Pendidikan, dan Agama, dapat dilihat pada keterangan berikut. Identitas transmigran asal Jawa Timur dapat dilihat sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 jenis kelamin transmigran 100 % adalah laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan adalah 0 %.

Identitas transmigran asal Jawa Timur lokasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara berdasarkan umur dapat dilihat sebagai berikut. Tahun 2012 transmigran berumur 20-29 tahun adalah 0 %, 30-39 tahun adalah 60 %, 40-49 tahun adalah 40 %, 50-59 tahun adalah 0 %, dan 60-69 tahun adalah 0 %. Tahun 2013 transmigran berumur 20-29 tahun adalah 2 %, 30-39 tahun adalah 39 %, 40-49 tahun adalah 46 %, 50-59 tahun adalah 14 %, dan 60-69 tahun adalah 0 %. Tahun 2014 transmigran berumur 20-29 tahun adalah 3 %, 30-39 tahun adalah 39 %, 40-49 tahun adalah 47 %, 50-59 tahun adalah 6 %, dan 60-69 tahun adalah 6 %. Tahun 2015 transmigran berumur 20-29 tahun adalah 0 %, 30-39 tahun adalah 50 %, 40-49 tahun adalah 50 %, 50-59 tahun adalah 0 %, dan 60-69 tahun adalah 0 %.

Identitas transmigran asal Jawa Timur lokasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara berdasarkan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut. Tahun 2012 tidak sekolah 0 %, Sekolah Dasar 40 %, Sekolah Menengah Pertama 0 %, Sekolah Menengah Atas 40 %, dan Perguruan Tinggi 20 %. Tahun 2013 tidak sekolah 2 %, Sekolah Dasar 23 %, Sekolah Menengah Pertama 81 %, Sekolah Menengah Atas 21 %, dan Perguruan Tinggi 4 %. Tahun 2014 tidak sekolah 0 %, Sekolah Dasar 42 %, Sekolah Menengah Pertama 28 %, Sekolah Menengah Atas 28 %, dan Perguruan Tinggi 3 %. Tahun 2015 tidak sekolah 0 %, Sekolah Dasar 50 %, Sekolah Menengah Pertama 50 %, Sekolah Menengah Atas 0 %, dan Perguruan Tinggi 0 %.

Identitas transmigran asal Jawa Timur lokasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara berdasarkan agama dapat dilihat sebagai berikut. Tahun 2012 transmigran yang beragama Islam 100 %, agama Kristen dan agama lainnya 0 %. Tahun 2013 transmigran yang beragama Islam 100 %, agama Kristen dan agama lainnya 0 %. Tahun 2014 transmigran yang beragama Islam 97 %, agama Kristen 3 % dan agama lainnya 0 %. Tahun 2015 transmigran yang beragama Islam 100 %, agama Kristen dan agama lainnya 0 %.

Kepemilikan barang elektronika para transmigran di daerah asal Jawa Timur sebelum di lokasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dapat dilihat sebagai berikut.

1. Tahun 2012 memiliki Modul TS 0 %, Accu 0 %, Sollar Cell 0 %, Hand Phone 0 %, Televisi 20 %, Kulkas 0 %, dan Radio 20 %.
2. Tahun 2013 memiliki Modul TS 0 %, Accu 0 %, Sollar Cell 0 %, Hand Phone 0 %, Televisi 23 %, Kulkas 3 %, dan Radio 9 %.
3. Tahun 2014 memiliki Modul TS 0 %, Accu 0 %, Sollar Cell 0 %, Hand Phone 0 %, Televisi 24 %, Kulkas 4 %, dan Radio 5 %.
4. Tahun 2015 memiliki Modul TS 0 %, Accu 0 %, Sollar Cell 0 %, Hand Phone 0 %, Televisi 0 %, Kulkas 0 %, dan Radio 33 %.

Kepemilikan barang elektronika para transmigran daerah asal Jawa Timur setelah berada di lokasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dapat dilihat sebagai berikut.

1. Tahun 2012 memiliki Modul TS 0 %, Accu 0 %, Radio 14 %, Sollar Cell 14 %, Hand Phone 0 %, TV 0 %, Laptop 0 %, dan Kulkas 0 %.
2. Tahun 2013 memiliki Modul TS 1 %, Accu 2 %, Radio 7 %, Sollar Cell 9 %, Hand Phone 1 %, TV 6 %, Laptop 0 %, dan Kulkas 0 %.
3. Tahun 2014 memiliki Modul TS 0 %, Accu 2 %, Radio 2 %, Sollar Cell 9 %, Hand Phone 0 %, TV 9 %, Laptop 2 %, dan Kulkas 0 %.
4. Tahun 2015 memiliki Modul TS 0 %, Accu 0 %, Radio 0 %, Sollar Cell 0 %, Hand Phone 0 %, TV 0 %, Laptop 0 %, dan Kulkas 0 %.

## **KESIMPULAN**

Dari temuan penelitian di atas ternyata salah satu indikator kemakmuran yang ditinjau dari aspek kepemilikan transmigran atas barang-barang elektronik ternyata kurang relevan. Hal ini nampak ketika diperbandingkan kepemilikan barang-barang elektronika antara sebelum dan setelah transmigran ditempatkan di lokasi transmigrasi yang terjadi justru tidak meningkat pada benda elektronik tertentu. Sebaliknya terdapat benda elektronik tertentu yang justru ada dan dimiliki setelah mereka berada di daerah transmigrasi karena kebutuhan, misalnya adalah *solar cell* akibat akses listrik dari PLN yang belum bisa diperoleh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Manuwijaya, Mirwanto, (2004) *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
2. N. Dunn, William, (2003) *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, edisi kedua. Peters, Guy B, 1984, *American Public Policy*, Tulano University, Franklin Watts, New York.
3. Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi, (1989) *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta.
4. Usman, Husaini dan Purnomo Setyady Akbar, 1986, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
5. Weimer, David L dan Vining, Aidan R, (1999) *Policy Analysis Concepts and Practice*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
6. Wibawa, Samodra, dkk, (1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.